

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK WARGA NEGARA
(Studi DPW Partai Amanat Nasional DIY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

M.SYIHAB ABU NIZAR DM
19103040102

PEMBIMBING :

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
NIP: 196502101993032001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

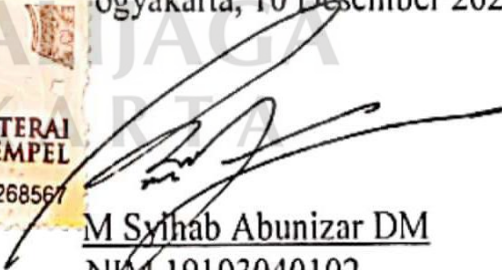
Nama : M. Syihab Abunizar DM
NIM : 19103040102
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara (Study DPW Partai Amanat Nasional DIY)

Menerangkan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN JAGRA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 10 Desember 2023




M Syihab Abunizar DM
NIM 19103040102

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Syihab Abunizar DM

NIM : 19103040102

Judul : Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara (Studi DPW Partai Amanat Nasional DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2023

Pembimbing



Dr.Hj. Siti Fatimah, S.H.,M.Hum.

NIP : 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-48/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
WARGA NEGERA (STUDI DPW PARTAI AMANAT NASIONAL DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M SYIHAB ABUNIZAR DM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040102
Telah diajukan pada : Jumat, 29 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: M5a6a1UN7s



Pengaji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 84a66667a6da



Pengaji II

Syaifulahid Masduki, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6395327a4d11



Yogyakarta, 29 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6395327a4d11

ABSTRAK

Partai politik sebagai salah satu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara, memiliki peran dan fungsi yang fundamental yakni menampung aspirasi warga negara untuk diperjuangkan dan disuarakan dengan tujuan dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Atas dasar aspirasi harus dapat terpenuhi melalui partai politik, pendidikan politik menjadi kewajiban bagi partai untuk melaksanakannya dengan tujuan agar partisipasi politik warga negara dapat dijalankan. Tugas partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik diatur didalam undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sehingga pendidikan politik menjadi kewajiban dari partai politik dengan tujuan partisipasi politik warga negara dapat ditingkatkan. Partisipasi politik warga negara untuk terlibat dalam kegiatan politik harus terus ditingkatkan melalui partai politik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan terjun langsung ke lapangan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi data. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah PAN DIY dengan melakukan wawancara langsung pada ketua DPW.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara, DPW PAN DIY melaksanakan Pendidikan politik sebagai bagian dari strategi partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Sasaran dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai ialah kader partai dan masyarakat umum. Pendidikan politik oleh DPW PAN DIY dilaksanakan dengan menggunakan beberapa bentuk pendidikan politik seperti Latihan kader amanat dasar, pelatihan TOT saksi DPD se-DIY, debat competition mahasiswa, kampanye politik, serta sosialisasi pemilu. Tujuan dari dilaksanakannya pendidikan politik ini adalah agar kader partai agar memiliki kompetensi dalam menjalankan kerja-kerja politik serta pada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat melek terhadap politik dan meningkatnya partisipasi politik warga negara.

Kata Kunci : Partai Politik, Pendidikan Politik, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

Political parties, as one of the organizations formed by a group of citizens, have a fundamental role and function, namely accommodating the aspirations of citizens to be fought for and voiced with the aim of being formulated into policies oriented towards the interests of the people. On the basis that aspirations must be fulfilled through political parties, political education is an obligation for parties to carry out with the aim that citizens' political participation can be carried out. The duty of political parties to carry out political education is regulated in Law Number 2 of 2011 concerning amendments to Law Number 2 of 2008 concerning political parties so that political education becomes an obligation of political parties with the aim that citizens' political participation can be increased. Political participation of citizens to engage in political activities must continue to be improved through political parties.

This research uses a type of field research by going directly to the field which is descriptive in nature using data collection techniques carried out through interviews, observation and data documentation. The object studied in this research is the PAN Yogyakarta Regional Leadership Council by conducting direct interviews with the DPW chairman.

The results of the study show that in an effort to increase citizen political participation, DPW PAN DIY implements political education as part of a political party's strategy to increase citizen political participation. The targets of political education conducted by the party are party cadres and the general public. Political education by DPW PAN DIY is carried out by using several forms of political education such as basic mandate cadre training, TOT training for DPD witnesses throughout DIY, student competition debates, political campaigns, and election socialization. The purpose of the implementation of this political education is for party cadres to have competence in carrying out political work and for the community to be politically literate and increase citizen political participation.

Keywords: Political Party, Political Education, Political Participation.

MOTTO

“Hasta La Victoria Siempre”

“Maju Terus Menuju Kemenangan”

(Che Guevara)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Kakek Alm. Ahmad Taher, Nenek Almarhumah. Fatimah Ebba
&
Almarhumah Kakak kembar NONA (Nova & Novi)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ

العَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدِ

اللَّهُ رَسُولَ مُحَمَّدًا إِنَّ أَشْهَدُ وَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سَلَامٌ وَ بَارِكٌ وَ صَحْبُهُ وَ آلُهُ عَلَى وَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى سَلَامٌ وَ صَلِّ اللَّهُمَّ

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dan menamatkan jenjang sarjana strata satu dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa saya kirimkan pada Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Atas ikhtiar dan doa, penulis dengan keterbatasan yang ada berusaha sebaik-baiknya untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara (Studi DPW Partai Amanat Nasional)". Akhirnya melalui tulisan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr.Hj. Siti Fatimah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing akademik dan Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan produktif bagi penulis dalam bidang akademik
5. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Ayah dan Ibu terima kasih atas cinta, kasih sayang dan doa-doa tulus yang mengiringi langkah. Semoga kesehatan dan umur panjang menyertai ayah dan ibu.
7. Kepada adik-adikku (Ummy Fatihah Rizkiyah DM, Ridho Ibnu Ahmad DM, El-diman Nur Zaman DM, Hadad Ibnu Azmar DM) terima kasih telah rela berbagi kasih, penopang yang terus memberi kekuatan
8. Kepada opu Ibnu Abdullah dan Kakak Masitta Ahmad terima kasih telah merawat dan membesarkanku dengan penuh dengan kasih sayang.
9. Kepada kakak saudari-saudari ayah (Sofia Ahmad, Mastura Ahmad, Masitta Ahmad, Fatimah Ahmad) terima kasih telah menjadi penguat bagi kami, pendorong yang terus memeberikan semangat dengan kasih sayang yang tulus
10. Kepada paman penulis (paman mukhlis, paman hamid, paman zola, husnul, paman zola, paman joko, paman syaifi) yang terus memberikan semangat dan

dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan serta telah kebersamai orang tua penulis.

11. Kepada senior sekaligus mentor-mentor saya, Ci Ahsad, paman Raden, Opu Rafly, Opu Hakim, Opu Ikwan, Bang Asfar, Bang Anand. Terima kasih telah banyak memberikan banyak pengetahuan baru sedari saya menapaki kaki di tanah Yogyakarta
12. Kepada Yahitd M. Saleh, saudaraku sedari masa kanak-kanak yang terus kebersamai penulis dalam kondisi apapun dengan penuh ketulusan. Terima kasih Mabrooo
13. Adinda Indah Habidah, Almumtahana Hafid, Era Fauzira, terima kasih telah menjadi adik yang tulus berbagi kasih kepada penulis.
14. Kepada kakak seperantauan Fatimah Kamal yang telah banyak membantu dengan ikhlas dan sabar menemani penulis sedari awal di tanah rantau, danke kakak-ku.
15. Kawan-kawan Serikat Mahasiswa Indonesia. Terima kasih telah menjadi kawan seperjuangan yang militan, loyal dan solid dalam semangat perlawanan. Hasta La Victoria Siempre
16. Kawan-kawan Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta. Terima kasih telah bersama dalam suka dan duka pada setiap dinamika di perantauan. Lewotana Ake Gelupak
17. Sahabat-sahabat komedian ceria berprestasi namun seringkali berlinang air mata hanya karena patah hati sebab kisah asmara yang kandas di trotoar jalan. Danke

- banyak Kamal, Kawakib, Raplek, Madiha, Syarif, Pang-pang, Azkal, Muham, Rafly Fahrezi, Imam, Rama. Jangan lupa tertawa lagi hari ini, besok dan nanti.
18. Kawan-kawan Ilmu Hukum 2019, Kamal, Kawakib, Rafliyansyah, Madiha, Syarif, Rama, Naufal, Muhammad, Pang-pang, Fahmi, boncel, Imam, Azkal, Mahya, zeni, vira, okta dan yang tidak bisa penulis sebutkan saru persatu. Danke banyak telah berbagi ilmu semasa kuliah saat dikelas maupun di warung kopi. Tetaplah hidup untuk menghidupi, nafas panjang menyertai kita semua.
19. Kawan-kawan KKN 111 Dusun temon, Fahmi, Bagas, Annisya, Lula, laili, Nida, Elina yang telah berbagi pengalaman kerja kolektif semasa KKN. Atas suka dan duka selama KKN Jojo ucapkan terima kasih dan mohon maaf.
20. Kepada Rafi, pires, hijra, gilang. Danke atas kebersamaan yang diberikan. Ingat kuliah, sholat dan menabung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi masukan agar lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Desember 2023

Penulis

M Syihab Abunizar DM

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis penelitian	19
2. Sifat penelitian.....	19
3. Lokasi Penelitian	19
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Teknik Pengumpulan Data	20
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II	22
TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK SERTA PARTISIPASI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	22
A. Tinjauan Umum Partai Politik	22
1. Pengertian Partai Politik.....	22
2. Fungsi Partai Politik.....	25
3. Tujuan Partai Politik	27

B. Tinjauan Umum Partisipasi Politik	29
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	29
2. Fungsi Partisipasi Politik.....	31
3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	32
C. Pendidikan Politik	35
1. Pengertian Pendidikan Politik	35
2. Tujuan pendidikan politik	38
3. Bentuk Pendidikan politik.....	41
BAB III.....	46
GAMBARAN UMUM DPW PARTAI AMANAT NASIONAL DIY dan PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DPW PAN DIY	46
A. Sejarah DPW Partai Amanat Nasional DIY	46
B. Profil DPW PAN Daerah Istimewah Yogyakarta	51
C. Pendidikan Politik Oleh DPW PAN DIY	59
BAB IV	63
ANALISA PERAN DAN STRATEGI DPW PARTAI AMANAT NASIONAL DIY DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT.....	63
A. Strategi Pendidikan Politik DPW PAN DIY	65
B. Hambatan Partai Politik dalam meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara	73
BAB V.....	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
CURICULUM VITAE.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia setelah menyatakan diri merdeka dan didaulat sebagai sebuah negara, para pendiri bangsa melalui UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia menganut asas dan system pemerintahan demokrasi. System demokrasi diyakini sebagai suatu system yang baik dan ideal digunakan dalam menjalankan pemerintahan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat sipil. Masyarakat dapat secara penuh menjalankan hak-hak politiknya sebab kedaulatan berada ditangan mereka: rakyat sebagai pemegang kendali kekuasaan, memilih dan juga memimpin, mereka kemudian melakukan pengawasan yang ketat, bahkan menjatuhkannya.¹

Salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi dalam suatu negara adalah dengan adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik masyarakat sipil harus benar-benar dijamin oleh negara melalui organisasi politik terkait. Dalam hal ini, partai politik yang menjadi salah satu pilar demokrasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Demokrasi dalam prosesnya nampaknya memiliki rute panjang yang sulit dilalui, keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi obyektif penguasa yang seolah-olah acuh pada tujuan demokrasi yang sebenarnya. Cita-cita nasional untuk membawa rakyat pada kesejahteraan dan kemakmuran menjadi semangat

¹ Amin Muhammad, *Dilema Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 264.

secara kolektif untuk merekonstruksi demokrasi yang salah dalam penerapannya, bukan argumentasi pragmatis yang justru keluar dari tuntutan ke arah demokrasi.

Pemahaman demokrasi memang luas dan sangat beragam. Banyak model demokrasi yang sudah diterapkan oleh berbagai negara didunia ini, karena ciri dan model negara demokrasi tidak universal.² Hal ini disebabkan karena demokrasi berasal dari berbagai sumber dan kondisi kultural, sosial, ekonomi, dan politik setiap negara bangsa. Demokrasi telah mengalami perjalanan yang sangat panjang sehingga yang dipahami saat ini sudah jauh berbeda dengan demokrasi yang dipahami pada zaman Yunani dan Romawi.

Negara yang demokratis akan memiliki rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuatan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik.³ Pada pembahasan ini dimaknai dengan pemilu memiliki fungsi yang utama untuk menciptakan politik yang benar-benar merupakan kehendak rakyat atas pemilihan sendiri.

Pemilu merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga negara, baik dalam akses pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik. Pemilu sebagai wadah untuk perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis

² Arifin Anwar, *KOMUNIKASI POLITIK: Filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm., 23-24.

³ Cholisin, "Mengembangkan partisipasi warga negara dalam memelihara dan mengembangkan sistem politik Indonesia" *Jurnal Civis*, Vol.6 No.1 Juni 2009

untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertama kalinya pada 1955, dimana 10 tahun setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Pada pemilu legislatif ini tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4%, namun pemilu ini tidak berjalan secara berkelanjutan dan baru dilanjutkan lagi pada tahun 1971 yang mencapai partisipasi 96,6%. Sejak saat itu pemilu dilakukan secara kontinyu dalam masa periode 5 tahun sekali.

Pada tahun 2019 pertama kalinya bagi Indonesia melakukan pemilihan umum secara serentak termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁴ Dari daftar pemilih tetap DIY sebanyak 2.731.874 yang terbagi menjadi Kota Yogyakarta 324.903 jiwa, Kulon Progo 334.893 jiwa, Gunung Kidul 605.894 jiwa, Bantul 707.009 dan Sleman 774.609 jiwa. Pada agenda pilkada 2017 serentak capaian target partisipasi pemilih sebesar 67,5% dan pemilu serentak 2019 target partisipasi masyarakat yang ditetapkan oleh KPU Yogyakarta yaitu sebesar 77,5% dan mengalami peningkatan sebesar 84,9% atau sebanyak 275.552 jiwa.

Presentase yang menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu sudah barang tentu tidak lepas dari peran partai politik dalam negara demokrasi

⁴ Kamal Syiefa Rio. "Kajian Tentang Proyeksi Partisipasi dan Perilaku pemilih dalam Pemilu 2024(Studi kasus di DIY)". 2023.

modern ini. Partai politik harus benar-benar bisa menciptakan dinamika politik yang sehat yang berorientasi pada terwujudnya cita-cita demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam menciptakan iklim perpolitikan yang demokratis, partai politik harus mempunyai langkah strategis dalam memberikan kesadaran akan pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan politik, recruitmen politik, sosialisasi politik serta bentuk partisipasi politik lainnya harus ditumbuhkan oleh partai politik pada masyarakat sipil. Peran fungsi partai politik ini harus sejalan dengan amanat undang undang yang tertuang dalam pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik disebutkan fungsi partai politik sebagai berikut: ⁵

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

4. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pada umumnya partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti di negara-negara yang sudah matang kehidupan politiknya. Partai politik diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat dan memasukannya kedalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi partai politik seringkali dihadapkan oleh beberapa masalah seperti kemiskinan, terbatasnya lahan pekerjaan dan tingkat buta huruf yang tinggi.

Kiprah partai politik di Indonesia seharusnya bisa menampilkan diri sebagai agen pencerahan. Sebab partai politik mengemban peran dan fungsinya yang kalau saja dijalankan secara konsisten akan membawa perubahan pada peningkatan kesadaran politik masyarakat. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan fungsi pendidikan partai politik belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Justru yang marak akhir-akhir ini partai politik menuai banyak kritik dari masyarakat, Karena partai politik cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit partai politik daripada kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Ironisnya,

pendidikan politik yang kerap dikumandangkan para elit partai politik hanya sebuah slogan tak bermakna. Selain itu maraknya kasus korupsi dan kasus hukum yang dilakukan oleh sejumlah elit partai politik semakin membuat kepercayaan masyarakat (public trust) kian menurun terhadap citra partai politik tersebut. Kondisi yang seperti inilah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun dari tahun ke tahun.

Hingga saat ini, masyarakat masih beranggapan bahwa sistem politik Indonesia itu bukan urusan rakyat melainkan urusan pemerintah dan orang-orang yang telah dipilih untuk memimpin, sehingga masyarakat merasa bahwa kerja pemerintahan merupakan pengejawantahan dari amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi acuh dan tidak mau melibatkan diri dalam urusan politik. Solusi dari problem yang terjadi tersebut ialah pendidikan politik bagi warga negara yang dilakukan oleh partai politik.

Pengembangan pendidikan politik Masyarakat Yogyakarta adalah bagian dari pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik di Yogyakarta yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.

Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik di kota Yogyakarta menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara khususnya Kota Yogyakarta. Dengan demikian pendidikan politik yang diterapkan merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinyu dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak masyarakat bangsa, hal yang sama juga di Yogyakarta

Partai politik sering tidak mampu menengahi pertikaian dalam masyarakat dan persaingan antar partai menimbulkan masalah baru yang seharusnya tidak seharusnya untuk ditimbulkan. Situasi seperti ini menimbulkan pengalihan perhatian yang jauh sehingga masalah yang seharusnya diselesaikan seperti mengatasi masalah kemiskinan dan masalah yang lainnya menjadi sasaran utama dalam masyarakat yang ingin berkembang.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara” melalui pelaksanaan Pendidikan Politik yang

dilakukan oleh DPW Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilu sehingga terciptanya demokrasi yang adil dan menjadi bahan acuan bagi dunia pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang menjadi objek penelitian proposal ini adalah:

1. Bagaimana peran dan strategi yang digunakan partai politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara?
2. Apa saja hambatan yang ditemukan oleh partai dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan peran dan strategi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara serta dampak dari kinerja parpol yang memiliki peran penting terhadap peningkatan partisipasi warga negara.
- b. Untuk menemukan faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik warga negara

2. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Hukum dan lebih spesifik pada Hukum Tata Negara yang selanjutnya berfokus pada peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses universal yang harus dilaksanakan untuk mendapat teori yang terdahulu. Menelusuri kepustakaan yang terkait adalah tugas yang segera dilakukan, kemudian menyusunnya secara teratur. Menurut pendapat Gay, kajian pustaka meliputi secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat pengidentifikasian informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶ Hal ini membandingkan penelitian

⁶ Consuelo G. Sevilla... (et.al), *Pengantar Metode Penelitian*, Ter Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI-Pres, 2006), hlm, 31.

terdahulu dengan penelitian penulis sekarang. Adapun judul atau hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan diantaranya :

1. Payerli Pasaribu dalam jurnal yang berjudul “Peranan Partai Politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik”

Penelitian ini menggunakan teori dari Darminto yang mengatakan bahwa peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa dan partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisasi dan anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dari cita-cita yang sama. Dengan tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperebut kedudukan politik sedangkan partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajar orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian turut berpartisipasi politik.⁷

2. Indah Pratiwi, Setiyo Rahayu dan Triyanto Triyanto dalam jurnal yang berjudul “PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK DALAM GENERASI MUDA”

Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji organisasi-organisasi kepemudaan yang ada dalam partai dan bagaimana perjalanannya sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam hukum politik

⁷ Payerli Pasaribu, “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.

. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam mengkaji suatu kehidupan dalam organisasi kepemudaan dan menggunakan metode deskriptif

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam partai politic dapat diartikan sebagai sebuah organisasi sosial yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.⁸

3. Nurgiansyah dalam jurnal yang menganalisis tentang “Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Kewarganegaraan”

Masyarakat yang demokratis berarti masyarakat yang bersedia dan mau menerima perbedaan pandangan politik sehingga rasa tanggungjawab masyarakat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya partisipasi politik masyarakat di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini and find an understanding of phenomena in a particular setting.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik atau apa adanya untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang suatu fenomena tertentu yang terjadi.

⁸ Pratiwi, I., Rahayu, S., & Triyanto, T. (2020). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 130-138.

Dalam hal ini fenomena tersebut adalah partisipasi politik di masa pandemi. Dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sasaran penelitiannya yaitu sebagian masyarakat yang tinggal di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sleman yang terdiri dari Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Turi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi yakni pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Kabupaten Sleman yang akan melaksanakan pemilihan Bupati periode 2020-2025 dengan 3 pasangan calon. Lalu wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Sleman.. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan harapan mendapatkan jawaban yang sistematis agar dapat menjawab tujuan penelitian karena bersumber dari informan yang kredibel. Kemudian dokumentasi berupa pengambilan gambar dan rekaman. Dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan pada data yang bersifat tulisan, lisan, maupun gambar.⁹

⁹ Nurgiansyah, "Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan", *Journal Civic Hukum vol.6 No.1* (2021), 3-4.

4. Angga Natalia pada penelitian yang berjudul “PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015”

Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekrutmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.

Fungsi inilah yang dirasa belum maksimal karena pada proses pilkada serentak tahun 2015 ini ada beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah, bahkan daerah yang memiliki dua sampai tiga calon pun dikhawatirkan pada akhirnya akan memunculkan juga kandidat tunggal dikarenakan banyak yang tidak lolos verifikasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada dipertanyakannya nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia dan kinerja partai politik dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa¹⁰

5. Dennis Hizkia Lumeno, Agustinus Pati, dan Jones Tompodung pada penelitian yang berjudul “PERAN PARTAI POLITIK DALAM

¹⁰ Natalia Angga, “PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015”, *Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 (2015)*.

MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN”

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat sebagai warga negara. Dari kecil kita telah diberikan pendidikan tentang arti penting politik itu sendiri baik dari pelajaran disekolah maupun pada lingkungan sekolah. Dan dari hasil pendidikan ini didapati bahwa peranan dari partai demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan melalui kampanye, sosialisasi, bakti social dan beberapa kegiatan kemasyarakatan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum PDI Perjuangan secara rutin melakukan pendidikan politik kepada kader.¹¹

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, perbedaan yang dapat ditemukan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian yang difokuskan pada Partai dan juga pembahasan yang lebih mendalam mengenai peran dan strategi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara. Kemudian perbedaan selanjutnya

¹¹ Lumeno, D. H., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2021). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling). *Jurnal Eksekutif*, 2(1).

adalah fokus partai dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

E. Kerangka teoritik

Untuk mempertajam analisis penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Suprastruktur dan infrastruktur politik

Struktur politik dapat ditemukan pada setiap sistem politik diberbagai negara, struktur politik didalam sebuah negara dapat dipahami sebagai hubungan kelembagaan anatar komponen organisasi yang membentuk bangunan politik berkaitan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif. Penggunaan dan distribusi kekuasaan kemudian akan mempengaruhi nilai otoritatif sistem politik¹². dengan demikian, struktur politik dapat diartikan sebagai susunan kelembagaan dalam dinamika politik suatu bangsa dan negara yang terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik.

Almond dan Coleman membedakan struktur politik struktur politik dalam dua bagian yaitu suprastruktur politik yang terdiri dari sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, dan sektor politik pemerintahan; dan

¹² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 44

infrastruktur politik yang terdiri atas struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat.¹³

Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya, suprastruktur politik juga dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Sedangkan, Infrastruktur politik merupakan badan politik diluar kendali pemerintah yang keberadaannya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, aspirasi masyarakat diharapkan dapat tersalurkan melalui lembaga politik yang ada.

Partai politik sebagai salah satu komponen penting dari infrastruktur politik dianggap memiliki tugas lebih besar dalam menjalankan kerja-kerja politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang didalamnya mencakup struktur organisasi yang sudah mapan, pembagian tugas pokok dan fungsi, mempunyai suatu tujuan, ideologi dan juga perencanaan dan program¹⁴.

Partai politik secara teoritis didefinisikan sebagai organisasi yang didalamnya terdapat anggota yang terorganisir dengan cita-cita yang sama.

¹³ *Ibid...* hlm. 44

¹⁴ H. Cecep Suryana dkk, *Infrastruktur politik dalam bingkai NKRI*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD, 2022), hlm. 70

Tentu saja orientasi daripada itu adalah mendapatkan kekuasaan politik dan perebutan kedudukan secara konstitusional agar dapat menjalankan programnya.

Menurut Edmund Burke dalam buku dasar-dasar ilmu politik mendefinisikan partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju¹⁵. Menurut Lapalombara dan Anderson dalam dasar-dasar ilmu politik melontarkan pengertian partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menampakkan kandidat pejabat public melalui kegiatan pemilihan umum baik bebas maupun tidak bebas¹⁶.

Kemudian Sigmund neumann didalam buku dasar-dasar ilmu politik mendefinisikan “partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdapat pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dan menciptakan persaingan dengan memperoleh perhatian rakyat. Dengan demikian partai politik menjadi perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 16-17.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 16-17.

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas”¹⁷

2. Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif menjadi bagian di dalam dinamika politik. Antara lain dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice* dalam buku dasar-dasar ilmu politik mendefenisikan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.¹⁸

Selanjutnya ramlan subakti juga secara singkat mendefenisikan partisipasi sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Proses demokratisasi selalu menuju pada kedaulatan dan kedudukan rakyat dalam ranah politik, adanya keputusan dan kebijakan politik yang mengarah kepada rakyat maka rakyat juga harus menjadi bagian

¹⁷ *Ibid.* hlm. 16-17.

¹⁸ *Ibid.* hlm, 3.

dari pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan. Di Indonesia, tugas dan fungsi partai secara tegas juga di atur didalam undang-undang yang menyebutkan partai politik sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek tempat yang diteliti. Dalam hal ini adalah Partai politik peserta pemilu dan masyarakat guna memperoleh data serta informasi terkait strategi parpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni menemukan dan mendeskripsikan data yang diteliti secara lebih mendalam, terperinci, dan luas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DIY yaitu di jln. Imogiri Timur No.111, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun pengertian dari deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah metode penelitian ilmiah. Untuk mendapatkan data yang memadai dari masalah yang diteliti ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

a) Observasi

Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dan bertatap muka kepada partai politik dan masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi data

Adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada tempat penelitian

¹⁹ Sugiyono, "Pengertian Metode Deskriptif Analitis" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 4 (2018) hlm. 209.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan memahami dalam pembahasan skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sehingga menjadi satu kesatuan yang detail dan jelas. Penjabaran sistematika penyusunan skripsi ini dikelompokkan menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum penulis skripsi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum berisi kajian teoritik tentang teori partai politik serta teori partisipasi politik dan teori pendidikan politik

Bab III Gambaran umum memuat penjabaran profil dan struktur DPW partai amanat nasional DIY serta implementasi pelaksanaan pendidikan politik oleh DPW PAN DIY.

Bab IV Analisa tentang peran dan strategi partai politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses meningkatkan partisipasi politik warga negara.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada bagian terkahir termuat daftar pustaka dan berbagai lampiran terkait dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan dari uraian diatas sebagai berikut:

1. DPW PAN DIY dalam melakukan pendidikan politik sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara pada prosesnya telah menggunakan bentuk pendidikan politik secara formal dan informal melalui metode pendidikan antara lain Pelatihan, sosialisasi, workshop, seminar, sarasehan, kampanye, dan kegiatan sosial di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik berdasarkan pada amanat konstitusi dan aturan partai, selain itu pendidikan politik menjadi kebutuhan partai untuk meregenerasi anggota partai, untuk meningkatkan pemahaman politik kader yang mempuni serta menjadi bagian dari proses untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPW PAN DIY pada dasarnya sudah sejalan dengan amanat konstitusi yang termuat didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1 dan 2). Bahwasanya DPW PAN DIY sudah melaksanakan dengan baik pendidikan politik bagi anggota partai, kader partai, dan masyarakat umum sesuai pada undang-undang yang tertera

2. Proses pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali terdapat kendala yang menjadi hambatan bagi partai untuk merealisasikannya. Kendala yang didapati oleh partai diantaranya: a). Adanya pandangan miring masyarakat terhadap partai politik, b). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite politik akibat tidak terjawabnya sebagian aspirasi dari masyarakat, c). Kesadaran politik yang minim akibat dari latar belakang pendidikan yang rendah, d). Kondisi sebagian masyarakat yang hidup dalam keterbelakangan sehingga tidak adanya suatu dorongan dari dalam diri untuk terlibat dan melibatkan diri dalam persoalan-persoalan politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta berikut adalah saran yang dapat penulis usulkan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara melalui pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta strategi yang digunakan harus terus dilakukan dan berkelanjutan. Partai dalam hal melakukan pendidikan politik harus memberikan edukasi yang konkrit sehingga esensi dari pendidikan politik dapat diterapkan dengan benar, baik oleh kader partai maupun masyarakat umum.

2. DPW PAN DIY harus terus melakukan evaluasi atas pendidikan politik yang dilaksanakan untuk mencari solusi dan menemukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan yang didapatkan dalam melakukan pendidikan politik. DPW PAN DIY dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara harus mampu hadir ditingkat paling bawah masyarakat tidak hanya ditingkat ranting atau desa saja, akan tetapi dapat hadir ditingkatan RT/RW sebagai solusi dalam meningkatkan kepercayaan dan membangun komunikasi yang baik dengan warga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Buku

Amin Muhammad, *Dilema Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Anwar, Arifin, *KOMUNIKASI POLITIK: Filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt Gramedia Utama Pustaka Utama.

Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Labono, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indoneisa*, (Malang: UB, 2016)

Sevilla, Consuelo G.. (et.al), *pengantar Metode Penelitian*, ter Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI-Pres, 2006)

Sitepu, P Anthonius, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Soeharno, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, 2004.

Suryana, Cecep dkk, *Infrastruktur politik dalam bingkai NKRI*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Eko handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017)

Ramdlon Naning, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, (Jakarta: Liberty, 1982)

Jurnal

Angga, Natalia, “PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015”, *Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 (2015)*.

Pasaribu, Payerli “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.

Pratiwi, I., Rahayu, S., & Triyanto, T. (2020). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 130-138.

Cholisin, “Mengembangkan partisipasi warga negara dalam memelihara dan mengembangkan sistem politik Indonesia” *Jurnal Civis*, Vol.6 No.1 Juni 2009

Lumeno, D. H., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2021). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling). *Jurnal Eksekutif*, 2(1).

Ini, Arniti Ketut, “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR”, *Journal Ilmiah Dinamika Sosial*, (2020).

Nurgiansyah, “Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan”, *Journal Civic Hukum vol.6 No.1 (2021)*

Rio, Kamal Syiefa. “Kajian Tentang Proyeksi Partisipasi dan Perilaku pemilih dalam Pemilu 2024(Studi kasus di DIY)”. 2023.

Sugiyono, “pengertian metode deskriptif analitis” *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 4 (2018)*

Lain-Lain

Badan Pusat Statistik, 2022. *Ini Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif 1955-2019*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019> (20 Mei 2023)

<https://pan.or.id/sejarah-pan/> (20 September 2023)

<https://pan.or.id/prinsip-dasar/> (20 September 2023)

Wawancara dengan Bapak Arif Noor Hartanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil
Kongres V PAN di Sulawesi Tenggara 2020

Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 204 /VII/2023 tentang
Perubahan Kedua Kepengurusan DPW PAN Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Periode 2020-2025.

